

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TEGALWATON
TAHUN ANGGARAN 2023
(LKPPD)**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DESA : TEGALWATON
KECAMATAN : TENGARAN
KABUPATEN : SEMARANG**

TAHUN 2023



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TENGARAN
DESA TEGALWATON

Jalan Letnan Jendral Soemitro Nomor 17 -Desa Tegalwaton - Kode Pos 50775

email: tegalwatondesa@gmail.com

Tegalwaton, 31 Desember 2023

Nomor : 140/017/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : LKPPD Kepala Desa Tegalwaton
Tahun Anggaran 2023

KEPADA YTH. :
KETUA BPD TEGALWATON
Cq. CAMAT TENGARAN
Di -

SEMARANG

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan tahun anggaran 2023, maka sesuai peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Laporan pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku sebagai gambaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama menjabat yang terangkum dalam LKPJ Kepala Desa Tegalwaton tahun anggaran 2023 Kepada Badan Permusyawaratan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas perhatiannya.



Kepala Desa Tegalwaton

TRI WURYANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah, taufik dan HidayahNya, sehingga saya dapat menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai Kepala Desa Tegalwaton tahun anggaran 2023.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2023 di Desa Tegalwaton dapat terlaksana dengan baik, merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terutama kepada:

1. Dewanto Leksono Widagdo, S.STP.MM selaku Camat Tenganan dan seluruh jajarannya atas bimbingan dan arahnya.
2. Pendamping desa atas bimbingan, saran dan bantuannya.
3. Widiyono selaku ketua BPD dan seluruh anggotanya BPD, atas masukan, koreksi, dan kerjasamanya.
4. Perangkat Desa Tegalwaton dan staff atas dukungan dan semangatnya.
5. Lembaga kemasyarakatan Desa, PKK, RT/RW, LKMD, KPMD, BUMDESa, Karang Taruna, Pokdarwis, Posyandu, FKD, Gapoktan, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan seluruh warga masyarakat Desa Tegalwaton atas kepercayaan, dukungan, partisipasi dan kerjasamanya.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini saya buat, kritik dan saran akan menjadikan perhatian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf akan segala kekurangan.

Tegalwaton, 31 Desember 2023

Kepala Desa Tegalwaton



TRI WURYANTO

a. Pemberitahuan disampaikan kepada :

Bupati Semarang.

b. Tembusan Kepada :

1. Camat Tenganan;
2. BPD Tegalwaton;
3. Arsip.

BAB I PENDAHULUAN

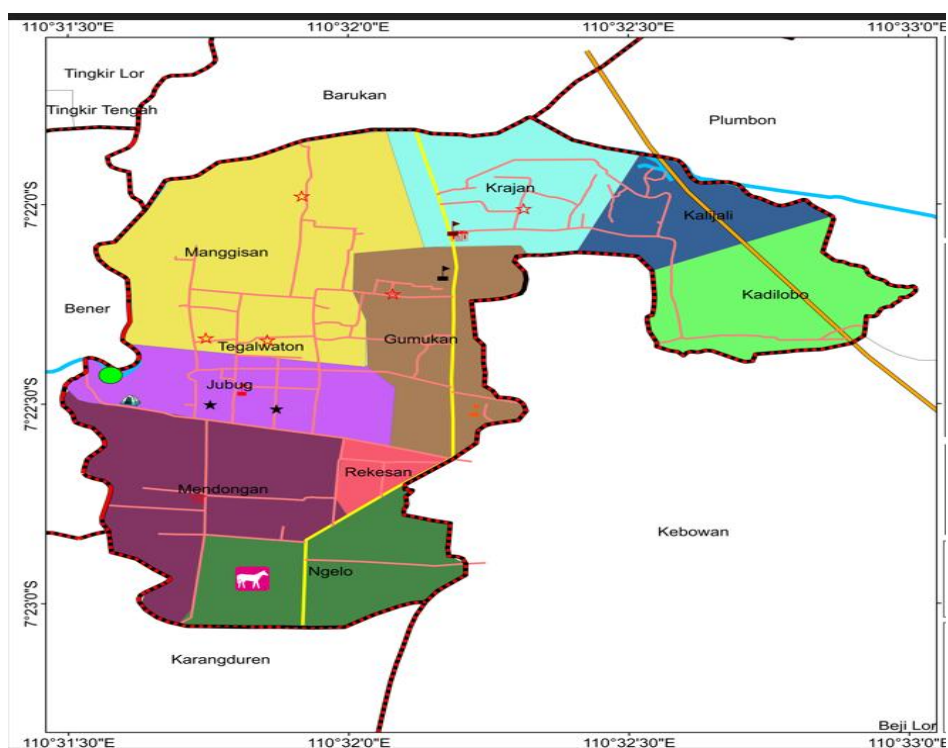
A. GAMBARAN UMUM DESA

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran secara umum tentang Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Desa Tegalwaton berada pada ketinggian 575 m dari dasar permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 3.480 mm, dengan suhu rata-rata 24°C. Luas wilayah Desa Tegalwaton yaitu 346.280 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- a. luas tanah sawah sebesar 73.140 Ha
- b. Luas tanah tegalan 47,210 Ha
- c. Luas tanah Pemukiman 221,640 Ha
- d. Luas lain-lain 4,290 Ha.



Sedangkan batas wilayah Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Barukan Kecamatan Tengaran, dan Kelurahan Tingkir Kota Madya Salatiga.
- b. Sebelah Selatan : Desa Karangduren Kecamatan Tengaran
- c. Sebelah Barat : Desa Bener Kecamatan Tengaran
- d. Sebelah Timur : Desa Kebowan Kecamatan Suruh.

2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk di Desa Tegalwaton berdasarkan data terakhir per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari 1.621 KK, yang terdiri dari 1339 laki-laki, dan 282 perempuan. Berikut Jumlah penduduk Desa Tegalwaton berdasar masing-masing kategori :

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan (terlampir)

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	507	500	1.007
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		365	365
3	PELAJAR/MAHASISWA	425	380	805
4	PENSIUNAN	14	12	26
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	17	15	32
6	TNI	3		3
7	KEPOLISIAN RI	4		4
8	PERDAGANGAN	3	13	16
9	PETANI/PEKEBUN	2076	138	344
10	INDUSTRI	1		1
11	KONSTRUKSI	1		1
12	TRANSPORTASI	1		1
13	KARYAWAN SWASTA	838	727	1.565
14	KARYAWAN BUMN	2		2
15	KARYAWAN BUMD	1		1
16	KARYAWAN HONORER	2	2	4
17	BURUH HARIAN LEPAS	142	99	241
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	1	3
19	BURUH PETERNAK	2		2
20	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7	6	13
21	TUKANG JAHIT	1	2	3
22	PENDETA	2	2	4
23	DOSEN	1		1
24	GURU	6	15	21
25	SOPIR	4		4
26	PEDAGANG	5	4	9
27	PERANGKAT DESA	8		8
28	KEPALA DESA	1	1	2
29	WIRASWASTA	195	156	351
30	LAINNYA			
JUMLAH		2.401	2.438	4.839

- b. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pendidikan (terlampir)

NO.	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/blm sekolah	512	520	1032
2	Blm tamat SD	181	185	366
3	Tamat SD	733	775	1508
4	SLTP/Sederajat	524	497	1021
5	SLTA/Sederajat	402	382	784
6	Diploma I/II	4	5	9
7	Diploma III	5	17	22
8	Strata I/Diploma IV	36	55	91
9	Strata II	4	2	6
10	Strata III			
TOTAL		2401	2438	4839

c. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur (terlampir)

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	< 4	103	100	203
2	5 - 9	181	178	359
3	10 - 14	199	203	402
4	15 - 19	198	193	391
5	20 - 24	225	194	419
6	25 - 29	160	157	317
7	30 - 34	142	164	306
8	35 - 39	159	168	327
9	40 - 44	204	213	417
10	45 - 49	184	161	345
11	50 - 54	181	176	357
12	55 - 59	135	129	264
13	60 - 64	102	132	234
14	65 - 69	108	97	205
15	70 - 74	35	62	97
16	> 75	85	111	196
TOTAL		2401	2438	4839

3. Kondisi Pemerintahan

Dalam menjalankan program kerjanya, kepala desa dibantu perangkat desa dengan unsur Sekretariat, unsur teknis, dan kewilayahan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris desa, dibantu kaur umum dan perencanaan, dan kasi keuangan. Untuk unsur teknis terdiri dari kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Kesejahteraan rakyat. Sementara unsur kewilayahan adalah kepala dusun.

Desa Tegalwaton dibagi menjadi 8 RW sebagai berikut ini:

No	Nama Dusun	Jmlh RT	RW	Ket.
1.	Krajan	4	001	RT. 01 - RT. 04
2.	Gumukan	5	002	RT. 05 - RT. 09
3.	Jubug	3	003	RT. 10 - RT. 12
4.	Manggisan	4	004	RT. 13 - RT. 16

5.	Mendongan	2	005	RT. 17 – RT. 18
6.	Rekesan-Ngelo	5	006	RT. 19 – RT. 23
7.	Kalijali	5	007	RT. 24 - RT. 28
8.	Kadilobo	6	008	RT. 29 – RT. 34

Adapun susunan Aparatur Pemerintah Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Tri Wuryanto
- b. Sekretaris Desa : N.M. Pujiastuti
- c. Kepala Urusan Umum & Perencanaan : Tri Wahyuni
- d. Kepala Urusan Keuangan : Otik Anindianto
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan : Kukuh Budiarta
- f. Kepala Seksi Pemerintahan : Pujianti
- g. Kepala Seksi Pelayanan : Agus Ahmadi
- h. Kepala Dusun Krajan : M. Pandhu W
- i. Kepala Dusun Gumukan : M. Amin Khoirudin
- j. Kepala Dusun Jubug : Siti Aminah
- k. Kepala Dusun Manggisian : Tamrin
- l. Kepala Dusun Mendongan : Jamil
- m. Kepala Dusun Rekesan-Ngelo : Bagiyo
- n. Kepala Dusun Kalijali : Hawari
- o. Kepala Dusun Kadilobo : Harwanto

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 ini merupakan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan dan Kebijakan yang dilakukan Kepala Desa dalam penyelenggaran Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan penanggulangan bencana selama satu tahun anggaran. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yaitu transparansi dan akuntabilitas.
2. Sebagai gambaran atas pencapaian tingkat kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun waktu satu tahun.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja kepala desa dan pemerintahan desa dalam kurun waktu berjalan
4. Memberikan informasi kepada Bupati, Camat, BPD dan masyarakat atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

5. Memberikan informasi mengenai keberhasilan yang telah dicapai, kendala yang ditemui, dan upaya yang telah dilakukan.
6. Memberikan gambaran terkini mengenai program yang telah dilaksanakan, yang masih berjalan dan yang belum terlaksana.

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Berdasarkan visi atau tujuan yang ingin dicapai oleh kepala desa terpilih tentang gambaran desa yang diharapkan selama 6 tahun kedepan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwaton pada periode 6 (Enam) dimulai tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Visi Desa

“MEWUJUDKAN DESA TEGALWATON MENJADI DESA MANDIRI SEJAHTERA MELALUI BIDANG PERTANIAN , INDUSTRI KECIL DAN PARIWISATA SERTA PENINGKATAN HASIL PENDAPATAN ASLI DESA”.

Makna yang terkandung dari visi Desa ini adalah :

- Terwujudnya Desa Tegalwaton menjadi desa mandiri yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian dan juga pariwisata.
- Mandiri adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi keTegalwatonannya sendiri melalui kemandirian ekonomi.
- Kesejahteraan dapat tercapai dengan Percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan menggali potensi local yang dimiliki desa untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dan ekonomi warga.

2. Misi Desa

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut di atas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya;
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang;

- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata;
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, dan adanya kesetaraan gender.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tahun anggaran 2023, tentunya tidak lepas dengan berbagai isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan yang diambil dengan menyelaraskan dengan arah dan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Semarang dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki desa.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa tegalwaton Tahun anggaran 2023 berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan

3. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran dalam hal ini bahwa Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat dengan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa tegalwaton Tahun anggaran 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-1 yaitu “*Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, transportasi dan infratrusktur strategis guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
 - b. Pemerataan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana transportasi dan penunjangnya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. Pengembangan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata, berkualitas, dengan kuantitas yang seimbang untuk memudahkan akses masyarakat secara cepat, tepat dan murah.
2. Kebijakan Umum dan program untuk mewujudkan Misi Ke-2 “Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang”
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat untuk menurunkan kematian ibu hamil dan melahirkan, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka stunting dan kurang gizi.

- b. Peningkatan pelayanan tenaga kesehatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam posyandu lansia, posyandu balita, posbindu dll.
 - c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - d. Meningkatnya penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
3. Kebijakan Umum dan program untuk mewujudkan Misi Ke-3 “Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik”

Menciptakan SDM yang beriman bertaqwa kepada Tuhan, berbudaya serta menguasai ilmu, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai IPTEK, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberian dukungan baik berupa fasilitas dan kebijakan bagi siswa usia belajar terutama bantuan bagi siswa miskin atau berprestasi.
 - b. Memberikan penguatan dan pembinaan pada guru dan sekolah non formal, TPA, TPQ atau sekolah minggu untuk meningkatkan kualitas moral sumber daya manusia.
4. Kebijakan Umum dan program kerja untuk mewujudkan Misi Ke-4 “Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong melalui bidang pertanian dan pariwisata,” dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian dengan bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
 - c. Pemantapan kelembagaan petani agar memperoleh kemudahan akses bahan baku dan teknologi pertanian yang ditunjang dengan perbaikan sarana prasarana.
 - d. Pengembangan wisata yang berbasis masyarakat, budaya, adat istiadat, dan potensi local yang dimiliki dengan mendorong keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku wisata.

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pengadaan pelatihan-pelatihan, sarasehan, pameran dan juga study banding ke wilayah lain.
5. Kebijakan umum dan program untuk mewujudkan misi ke 5 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, dan adanya kesetaraan gender” sebagai berikut:
- a. Partisipasi masyarakat

Bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat mengambil keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari keTegalwatanan warganya. Dalam hal ini atinya adanya keterlibatan masyarakat secara langsung mulai tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program program yang dilaksanakan sesuai dengan keTegalwatanan masyarakat.
 - b. Penerapan akuntabilitas anggaran, dimana seluruh anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan secara jelas sesuai prinsip atau aturan yang berlaku. Dimana pelaksanaan anggaran harus jelas peruntukannya, pengelolaannya dilakukan secara jelas baik alur, system, fungsi, dan pertanggung jawaban lembaga.
 - c. Penerapan prinsip transparansi

Artinya diartikan adanya kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai uapaya transparansi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - d. Efektivitas dan efisiensi

Bahwa dalam menjalankan program serta kebijakan, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran yang sebenarnya.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Jaminan Sosial BPJS Kepala Desa, Perangkat Desa
 - c. Jaminan Sosial BPJS BPD, RT/RW, LINMAS, Kader POSYANDU, KPMD, POSBINDU DLL.
 - d. Insentif dan Tunjangan RT/RW
 - e. Operasional dan Tunjangan BPD
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarpras Pemerintahan untuk difabel
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan Gedung dan Sarpras Kantor Desa / asset tetap
 - c. Penyediaan Sarpras Desa Layak Anak
3. Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - b. Pengelolaan Adm. Kearsipan PemDes
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah desa
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokumen keuangan, kebijakan desa, LPPD, LKPJ, Dll.
 - c. Pengelolaan Administrasi dan Inventarisasi aset
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - e. Dukungan sosialisasi Penjaringan Perangkat Desa
 - f. Penyelenggaraan Lomba & Pengiriman Kontingen
5. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Mediasi konflik pertanahan
 - b. Penentuan/Penegasan/Patok Tanah Kas Desa
 - c. Pensertifikatan tanah desa

B. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Bidang Pembangunan Desa tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
 - b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - c. Pengelolaan perpustakaan desa
 - d. Pengembangan sanggar seni
2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Polindes Milik Desa
 - b. Polindes obat reagent cek gula, asam urat
 - c. Oprasional Posyandu Lansia
 - d. Oprasional Posyandu Balita
 - e. PMT Posyandu Balita
 - f. Pembinaan palang merah remaja
 - g. Incentif posyandu
 - h. PPL Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - i. Incentif Kader KPM dan Oprasional
 - j. Pembinaan POSBINDU
 - k. Desa Siaga Kesehatan (STBM,FOGING,AMBULAN)
 - l. Pengasuhan Bersama /Bina Keluarga Balita (PPKBD)
 - m. Pelayanan Mobil siaga dan ambulan gratis
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
 - b. Pembangunan Gedung Serbaguna
 - c. Betonisasi Gumukan (100x2,5x0,12)
 - d. Betonisasi Jubug RT.10 (110 X 2,2 X 0,12)
 - e. Betonisasi Jubug RT.11 (110 X 2,2 X 0,12)
 - f. Betonisasi Kadilobo RT.29 (70 X 2,3 X 0,12)
 - g. Betonisasi Kalijali (350 x 2,2 x 0,12)
 - h. Betonisasi Krajan (75 X 2,5 X 0,12)
 - i. Betonisasi Manggisan (150 X 2.3 X 0,12)
 - j. Betonisasi Mendongan (50 X 2 X 0,12)
 - k. Betonisasi Ngelo (50 X 2,5 X 0,12)
 - l. Talud Jalan Kadilobo RT. 33 (27X 0,45 X 0,1)

- m. Talud jalan Kalijali
 - n. Pembangunan Jalut Manggisan
 - o. Pembangunan Jalut Kadilobo
 - p. Aspal jalan Kadilobo- Bambang RT.29
 - q. Aspal Jalan Manggisan-Nglegok RT.16
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN / RTLH
 - b. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - c. Pembuatan Bak Tampung
 - d. Pembuatan Jambanisasi
 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - b. Pelayanan Wifi gratis
 6. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pemeliharaan Sarpras Wisata Desa
 - b. Pelatihan BUMDES
 - c. Pembinaan Pokdarwis

C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Oprasional dan Peningkatan kapasitas LINMAS
 - b. Insentif Linmas
 - c. Pelatihan Mitigasi bencana
 - d. Pembangunan Pos Keamanan desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian Desa
 - b. Festival Kesenian, Adat, Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - c. Pengukuhan Sejarah Desa
 - d. Pengembangan dan pemeliharaan adat istiadat
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga
 - b. Pembinaan Karangtaruna

- c. Pembinaan Grup olahraga Sepakbola, Bola Volly, Badminton, Bola Ping –pong, Panahan, Pencak silat, dll.
- 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan PKK, LPMD, KPMD, P3AI, NU, RT/RW, BPD, DLL.

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Pembentukan kelompok peternak
 - b. Peningkatan produksi tanaman pangan
 - c. Penguatan ketahanan pangan
 - d. Pemberian bantuan pupuk
 - e. Pemberian bantuan bibit
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa
 - b. Peningkatan Kapasitas BPD
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - a. Pelatihan dan penguatan modal penyandang Difable
 - b. Penyuluhan dan perlindungan anak
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengadaan teknologi tepat guna
5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan dan pengelolaan BUM Desa
 - b. Peningkatan pasar desa
 - c. Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

E. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT

Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan bencana Desa tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Penanggulangan bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan keadaan mendesak / obat-obatan
 - b. Penanganan keadaan mendesak / sembako isolasi
 - c. Penanganan keadaan mendesak / BLT DD

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PERATURAN DESA TENTANG APBDES 2023

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan peraturan pelaksanaan APBDES tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwaton tahun 2020-2025, yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2019.
 - b. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2022
 - c. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022.
 - d. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2023.
 - e. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 18 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022
 - f. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 17 Tahun 2022 tentang penetapan keluarga penerima BLT DD Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2022
 - g. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 5 Tahun 2023 tentang penetapan keluarga penerima BLT DD Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023.
 - h. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 10 Tahun 2023 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023.

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDES TAHUN 2023

Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

C. RINCIAN APBDES 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.829.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.686.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.384.515.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	555.140.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	443.634.030,00	
5.3.	Belanja Modal	1.264.994.810,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.131.750,00	
	JUMLAH BELANJA	2.422.900.590,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.385.590,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.385.590,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.385.590,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	38.385.590,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

D. REALISASI APBDES TAHUN 2023

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2023 dapat dirincikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan desa :	Rp. 2.237.891.326,00
2. Belanja desa :	
a. Bidang Pemerintah Desa	Rp. 777.442.631,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.155.803.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 82.620.000,00
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 45.956.000,00
e. Bidang Penanggulanga Bencana	<u>Rp. 153.950.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.215.772.131,00
Surplus / (Defisit)	Rp. 22.119.195,00
3. Pembiayaan desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.385.590,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 60.504.785,00
Saldo Tol Awal Tahun di bank	<u>Rp. 117.277.807,00</u>
Saldo SILPA TAHUN 2023	Rp. 177.782.592,00

Bahwa masih adanya dana sisa tol awal tahun 2023 yang ada di rekening desa sebesar Rp. 117.277.807,-, sehingga Saldo SILPA desa Tegalwaton adalah sebesar Rp. 177.782.592,-

E. REALISASI APBDES PER BIDANG TAHUN 2023

Realisasi APBDES tahun 2023 perbidang sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Total
a	b	c	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		777,442,631
	101.00	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahar	-
		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	481,650,000
		Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja Kepala Desa	2,700,000
		Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja Perangkat	25,740,000
		Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja BPD	1,200,000
		Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja RT RW	6,800,000
		Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja LINMAS	5,200,000
		Jaminan Sosial Bpjs Tenaga Kerja Staff	500,000
		Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Staff	2,400,000
		Jaminan Sosial BPJS TK KADER	1,200,000
	10,104.00	Operasional Pemerintah Desa	16,001,000
		pajak dan bunga bank	1,071,631
		Pakaian Dinas	3,600,000
		Honor PPKD	-
		Honor Penanggung Jawab PPKD /Kades	6,000,000
		Honor Koordinator PPKD	4,800,000
		Honor Bendahara PPKD	3,600,000
		Honor PK Pemerintahan	2,400,000
		Honor PK Pelayanan	2,400,000
		Honor PK Kesejahteraan	2,400,000
		Honor PK Umum Perencanaan	2,400,000
		Honor Tunjangan Staff Teknis	22,100,000
		Honor Penjaga	16,250,000
		Honor Modin	16,250,000
		Honor Admin Siskeudes	2,400,000
		Honor Petugas Registrasi	1,200,000
		Honor sipades	1,200,000
		Honor Petugas SIKS NG	1,200,000
		Honor Petugas Ambulance	2,400,000
	10,105.00	Penyediaan Tunjangan BPD	-
		Ketua @ 350rb	4,200,000
		Sekretaris @ 300 rb	3,600,000
		anggota @ 250rb	15,000,000
	10,106.00	Penyediaan Operasional BPD	5,000,000
	10,107.00	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54,600,000
	102.00	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,250,000
	10,202.00	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17,000,000
	103.00	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-
	10,302.00	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2,180,000
	10,303.00	Pengelolaan Adm. Kearsipan Pemdes	3,000,000
		PEMBUATAN E KTP Administrasi Umum dan Kependudukan	390,000
	104.00	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	-
	10,401.00	Penyelg. Musren Desa/Apbdes (Reguler)	9,810,000
	10,402.00	Penyelg. Musdesa(Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	12,900,000
	10,404.00	Penyusunan Dok. Keuangan Apbdes, Perubahan, Lpj	1,000,000
		Pengelolaan Adminstrasi dan Inventarisasi aset	2,800,000
	10,408.00	Sistem Informasi Desa (WEBSITE, PEMEL JARINGAN)	800,000
	10,411.00	Penyelenggaraan Lomba & Pengiriman Kontingen	5,850,000
	105.00	Sub Bidang Pertanahan	-
	10,506.00	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,000,000

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,155,803,500
	201.00 Sub Bidang Pendidikan	-
	20,101.00 insentif Guru TPQ	20,000,000
	202.00 Sub Bidang Kesehatan	-
11	20,201.00 Penyelenggaraan Polindes Milik Desa	1,000,000
	Polindes obat reagent cek gula, asam urat	2,000,000
	Oprasional Posyandu Lansia	4,000,000
	Oprasional Posyandu Balita	4,000,000
	PMT Posyandu Balita	18,000,000
	Incentif posyandu	49,000,000
	insentif posyandu	1,500,000
	20,203.00 PPL Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6,000,000
	20,205.00 Pembinaan Posbindu	5,000,000
	20,204.00 Desa Siaga Kesehatan	-
	Bbm Ambulance	4,200,000
	Pajak Ambulance	1,200,000
	Servis Ambulance	1,000,000
TE	Kegiatan Pmk, Foging Dll	4,000,000
	Pertemuan Kader	3,150,000
	Pmi	900,000
	PENGASUHAN BKB	2,000,000
	Jambanisasi	20,000,000
	Betonisasi Gumukan Rt 6-7(202X2,5X0,12)	46,540,500
	Betonisasi Jubug Rt.11(110 X 2,2 X 0,12)	65,063,500
	Betonisasi Ngelo Rt 23 (80 X 2,5 X 0,12)	35,148,000
	Betonisasi Krajan rt2 (110X2X0,12)	33,144,000
	Aspal Kalijali Rt 24-28	120,000,000
	Aspal Mendongan Rt.17-18	120,000,000
	Aspal Manggis Rt.13-14	120,000,000
	KP JALUT kadilobo rt.29 (100 x 2,5 x 0,12)	39,693,000
	KP JALUT Krajan Rt.01 (100 X 2,5 X 0,12)	36,471,500
	KP JALUT KALIJALI (200X2,2X0,12)	54,850,200
	KP Talud JALUT Manggis (11)	12,792,800
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin / Rtlh	323,150,000
	20,602.00 Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1,000,000
	pokdarwis	1,000,000

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		82,620,000
301.00	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10,000,000
30,102.00	oprasional linmas	3,000,000
	insentif linmas	2,000,000
302.00	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-
30,201.00	Pembinaan Group Kesenian Desa	10,000,000
30,203.00	Festival Kesenian, Adat, Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)-----DAWU	16,620,000
30,306.00	Pembinaan Karangtaruna	5,000,000
	Pembinaan KKI	1,000,000
	Pembinaan bola Sepakbola	1,000,000
	pembinaan seragam bulu tankis	1,000,000
	Pembinaan Pagar Nusa	1,000,000
304.00	Pembinaan P3AI	1,000,000
	Pembinaan -NU	1,000,000
	Pembinaan KPMD	5,000,000
30,403.00	insentif Pembinaan PKK	15,000,000
	oprasiomal PKK	10,000,000
		-

d. Bidang Pemberdayaan Manusia

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		45,956,000
403.00	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-
40,302.00	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11,100,000
40,303.00	Peningkatan Kapasitas BPD PLUS PERANGKAT	1,886,000
406.00	Ketahanan Pangan 20%	32,970,000

e. Bidang Penanggulangan Bencana

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		153,950,000
501.00	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-
50,100.00	Penanggulangan Bencana	6,400,000
50,200.00	Penanganan Keadaan Darurat	3,550,000
50,300.00	BLT DD MAKSIMAL 25% = 40 ORANG	144,000,000

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut ini :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI

- a. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja Linmas
- b. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja RT/RW
- c. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja BPD
- d. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja 100 kader Posyandu
- e. Pemberian Tunjangan ke -13 bagi perangkat desa

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- a. Kurangnya kapasitas kemampuan perangkat desa, yang menyebabkan administrasi tidak rapi Minimnya pemantauan langsung dan pembinaan baik itu dari pemerintah tingkat kecamatan maupun dari tingkat kabupaten.
- b. Tingkat kesejahteraan perangkat desa yang masih dibawah standar mengakibatkan mereka cenderung untuk menomor duakan pekerjaan pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparat pemerintah desa . Rata rata mereka mencari pekerjaan sambilan sehingga kurang fokus terhadap tanggungjawab yang di embannya.
- c. Inventarisasi asset sangat sulit dilaksanakan, dengan belum selesainya tukar guling tanah pacuan dan juga tanah bengkok yang terkena jalan tol, dimana data otentik sangat minim.
- d. Pemberian BPJS Tenaga kerja Kader dan lembaga desa lainnya belum bisa terpenuhi semuanya dikarenakan dana tidak mencukupi
- e. Aset desa banyak terjadi perubahan baik kepemilikan, perjanjian sewa, dan pemindahtanganan dan alih fungsi yang belum diinventarisasi dengan baik.
- f. Tunjangan kinerja bagi perangkat belum bisa dilaksanakan dikarenakan dana tidak mencukupi

- g. Kurangnya kesadaran wajib pajak pemilik tanah di dalam dan diluar Desa Tegalwaton untuk melaporkan setiap transaksi pemindahan hak atas tanah
 - h. Terdapatnya perbedaan perhitungan administrasi, baik karena tanah sudah terjual kepada tol ataupun karena NJOP.
 - i. Kenaikan baku PBB.
 - g. Kepala Dusun Tidak tertib dalam menyetorkan pajak.
 - h. Pembayaran pajak PBB tidak disalurkan dengan benar
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa untuk menambah pengetahuan dan juga ketrampilan
 - b. Pembinaan dan Evaluasi kerja bagi perangkat desa secara rutin dalam rapat Seninan.
 - c. Inventarisasi asset diupayakan disusun dengan jelas dan teliti melalui pembentukan tim khusus untuk melakukan inventarisasi seluruh asset desa
 - d. Perlunya peningkatan PAD melalui Bumdes, sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan terhadap pengelolaan Bumdes.
 - e. Mediasi dan penyelesaian penggunaan asset desa oleh pihak lain
 - f. Pembinaan kepala dusun dan pemantauan atas penyetoran pajak dan penyampaian kitir Pajak PBB.
 - g. Penyuluhan tentang pertanahan, baik jual beli, status tanah, waris, bukti kepemilikan dll.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Pemberian bantuan kepada siswa miskin berprestasi
 - b. Pemberian insentif Kader Posyandu
 - c. Pelaksanaan anggaran desa siaga sangat membantu warga
 - d. Bantuan RTLH dengan jumlah yang cukup banyak, dari DD sebanyak 10 titik, dari Bantuan Kabupaten sebanyak 7 titik, dan bantuan Provinsi sebanyak 6 Titik.
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Jalan desa banyak yang rusak dan belum bisa terbangun karena prioritas dana masih untuk pemulihan ekonomi setelah pandemic
 - b. Pembinaan lembaga Pengelolaan sampah masih belum tertangani dengan baik

- c. Peningkatan dan pemeliharaan energy alternative belum bisa dilaksanakan
 - d. Pelatihan Bumdes belum berjalan
 - e. Pemberian bantuan jamban belum bisa dilaksanakan
 - f. Pembangunan gedung olahraga atau gedung serba guna belum bisa dilaksanakan
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Pembangunan infrastruktur, jalan desa, jalut, talud, jambanisasi diupayakan bantuan dari sumber APBD Kabupaten dan provinsi
 - b. Meningkatkan kesadaran warga dan pengelola dalam Pemeliharaan energy alternative
 - c. Meningkatkan kesadaran pengelola sampah untuk mengaktifkan organisasi
 - d. Pelatihan dan pembinaan Bumdes harus dilakukan secara intens dengan pendampingan

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Banyak muncul atlit atlit berprestasi dari klub olahraga desa yang menjuarai tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten dan nasional.
 - b. Semangat dan kesadaran warga untuk rajin berolahraga meningkat
 - c. Pemberian insentif Linmas untuk meningkatkan semangat dan penghargaan kepada anggota linmas
 - d. Pemberian insentif PKK dari bantuan kabupaten
 - e. Pelatihan anggota linmas untuk meningkatkan kapasitas anggota
 - f. Pelatihan mitigasi bencana untuk menambah krtrampilan dan pengetahuan dalam menangani bencana
 - g. Pengadaan sarpras linmas untuk meningkatkan kinerja
 - h. Pelatihan kursus pranotocoro diikuti oleh 40 lebih peserta yang sangat antusias dengan kebudayaan jawa
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Sarana prasaran olahraga yang ada di desa kurang memadai, sehingga latihan banyak dilakukan dengan keluar desa
 - b. Anggota linmas banyak yang belum mendapat insentif dari kabupaten
 - c. Kurangnya pembinaan lembaga desa dari apatur desa
 - d. Kurangnya pengetahuan warga mengenai bahaya media social

- e. Terbatasnya ajang atau sarana prasarana yang disediakan oleh desa untuk menampung kreatifitas remaja.
 - f. Banyaknya anak usia SMP yang menjadi korban media sosial
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Pembangunan sarana prasarana olahraga desa
 - b. Pemberian insentif anggota Linmas dari dana desa
 - c. Peningkatan Pembinaan kepada lembaga desa oleh perangkat desa
 - d. Penyuluhan penyuluhan akan bahaya media social dan pencegahannya
 - e. Pelibatan seluruh unsur masyarakat melalui lembaga lembaga desa dalam upaya pencegahan
 - f. Pendampingan korban penculikan dan pembunuhan
 - g. Bekerja sama dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS untuk penanganan kriminalitas.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Bantuan bibit padi yang unggul dan pendampingan pelatihan cara tanam yang benar untuk meningkatkan hasil pertanian
 - b. Studi banding cara tanam pohon pisang yang benar dan pengolahannya
 - c. Pembangunan Jalan Usaha Tani untuk memperlancar mobilitas petani dalam mengangkut pupuk dan hasil produksi pertanian
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Dalam pembagunan jalan usaha tani, adanya petani yang tidak bersedia diperlebar jalannya karena menganai lahannya
 - b. Pembelian bibit pisang dengan tipe yang diinginkan dikembangkan oleh petani tidak mencukupi jumlahnya
 - c. Pembinaan kepada kaum difabel belum bisa dilaksanakan dengan baik atau secara kontinyu
 - d. Fasilitasi UMKM untuk mengurus perijinan belum bisa dilaksanakan
 - e. Pelatihan menjahit belum bisa dilaksanakan karena minimnya modal yang dipakai
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Mengadakan pendekatan khusus yang melibatkan beberapa warga masyarakat kepada pemilik lahan yang akan terkena pelebarana jalut dan melakukan rembug dusun

- b. Pembentukan pengurus lembaga khusus difabel untuk bisa melakukan pembinaan dan pendampingan secara intens
- c. Pelatihan pelatihan akan diupayakan bekerja sama dengan LPK yang menyediakan sarpras dan agar lulusannya bisa mendapat penyaluran kerja.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI

- a. Kesigapan Satgas Covid, RT RW, Pemerintah Desa, Puskesmas dan seluruh lembaga desa dalam menangani warga yang terindikasi + positif covid, sehingga segera mendapat penanganan.
- b. Tingkat kesadaran warga sangat tinggi, sehingga setiap ada gejala segera melapor kepada satgas dan kesediaan untuk melakukan isolasi mandiri.
- c. Pemberian bantuan dari BPBD sangat cepat dalam menangani bencana
- d. Kesadaran social warga yang sangat tinggi dalam penanggulangan bencana
- e. Pemberian vitamin lansia dalam upaya peningkatan imun lansia yang rentan tertular covid.

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- a. Kurangnya kesadaran kepala dusun untuk terus memantau kondisi rumah warga yang akan roboh, dan melaporkannya kepada pemerintah desa untuk mengantisipasi rumah roboh atau pemberian bantuan RTLH.
- b. Kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam penanganan bencana dan keadaan darurat

3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

- a. Melakukan pembinaan terhadap perangkat desa dalam menjalankan tupoksinya
- b. Melengkapi sarana prasana yang diTegalwatonkan dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2023 adalah Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 8: *“Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.
2. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Program kegiatan Desa Tegalwaton tahun 2023 merujuk pada RPJM Desa Tegalwaton periode 2020-2025, dan juga RKP Desa tahun 2023, yang kemudian ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun anggaran 2023 melalui musyawarah Desa.
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar.

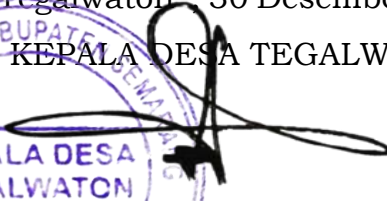
B. SARAN

1. Perlu adanya pembinaan dan pemantauan secara periodik dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk memperbaiki berbagai permasalahan di desa.
2. Perlu adanya kerjasama dan keterlibatan secara langsung, terprogram dan berkesinambungan antara semua stake holder baik masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan pendamping desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Tegalwaton, 30 Desember 2023

KEPALA DESA TEGALWATON


TRI WURYANTO



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang- Undangan	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Kepala Desa	11
		c. Keputusan Kepala Desa	54
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-Laki	
		2) Perempuan	
		3) Jumlah Kepala Keluarga	
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	
		2) TNI	
		3) Swasta	
3.	Pertanahan	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	1,7
		2) Tanah Ladang	10,5
		3) Bangunan Umum	1,6
		4) Perumahan	83,5
		5) Ruang Fasilitas Umum	1,9
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	18
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	10
		d. Musrengbangdes	8
		e. Musyawarah BPD	7

5.	Ketentraman Dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	32
		2) Alat Pemadam Kebakaran	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	32
		b. Ketentraman Dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	7
		2) Jumlah Bencana Alam	1
		3) Jumlah Operasi Penertiban	4
		4) Jumlah Pos Keamanan	15
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	2
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) RT/RW – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	ada
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	ada		

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1	Sarana Dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4,7
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	4
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	4

		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan - Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	2
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	4
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	4
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	0
		B. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	2
		2). Madrasah Diniyah (Jumlah)	0
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	0
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0
3	Pembangunan Kesehatan	A. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	
		B. Rumah Sakit Umum Swast (Jumlah)	0
		C. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0
		D. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	0
		E. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0
		F. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0
		G. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		H. Puskesmas (Jumlah)	0
		I. Apotik (Jumlah)	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1) Lapangan Sepakbola (Jumlah)	2
		2) Lapangan Bola Voli (Jumlah)	2
		b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:	0
		1) Gelanggang Remaja (Jumlah)	0
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	0
		3) Gedung Teater (Jumlah)	0
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	0
		c. Sarana Sosial:	0
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	0
		2) Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	0
		3) Panti Wordo (Jumlah)	0
4) Panti Jompo (Jumlah)	0		

		D. Sarana Komunikasi:	0
		1) Radio Komunitas (Jumlah)	1
		2) Papan Pengumuman (Jumlah)	1
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	3
		b. Industri Besar (Jumlah)	0
		c. Industri Sedang (Jumlah)	0
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	0
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	3
		f. Hotel (Jumlah)	0
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	0
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	2

3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah, Ada, Tidak Ada, Ya, Tidak
1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	Ada
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	Ada
		3) Peraturan Menteri Mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa	2

		(Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	6
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	6
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	6
2	Kewajiban Masyarakat Pelaksanaan Hak Dan	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	4
		b. Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat Memperoleh Informasi Dan Pelayanan Yang Adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat Mendapatkan Perlindungan Dari Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat Berpartisipasi Dalam Berbagai Kegiatan Di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3	Masyarakat Budaya Dan Sosial	a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi Mengenai Pengembangan Olah Raga Dan Kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Mengenai Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	6
		d. Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup (Beberapa Kali)	1
		e. Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba Dan Kriminal (Berapa Kali)	2
		f. Sosialisasi Mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	13
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	14
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	-

		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja Ke Luar Negeri (Jumlah)	-

4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah, Ada, Tidak Ada, Ya, Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	2
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	12
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	2
		c. Pemberdayaan Olah Raga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	3
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	-